



BUKU I

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**



**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
UNTUK TAHUN ANGGARAN 2019**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN**

: 43.A/LHP/XVIII.PLG/06/2020

: 22 JUNI 2020

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan

Jalan Demang Lebar Daun Nomor 2 Palembang 30137

Telp. 0711 410549 Fax. 0711 358948



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2019, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kota Palembang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko kesalahan penyajian yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kota Palembang untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kota Palembang. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan

kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kota Palembang, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kota Palembang tanggal 31 Desember 2019, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 43.B/LHP/XVIII.PLG/06/2020 dan Nomor 43.C/LHP/XVIII.PLG/06/2020 tanggal 22 Juni 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Palembang, 22 Juni 2020

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan
Penanggung Jawab Pemeriksaan,**



Harry Purwaka, S.E., MSF., AK., CSFA, CA
Register Negara Akuntan, No. RNA - 7704

LAPORAN KEUANGAN

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

No.	Uraian	Reff	2019			2018
			Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
1	PENDAPATAN	5.2.1				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.2.1.1				
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.2.1.1.a	1.314.232.400.000,00	832.056.845.614,28	63,31	721.012.771.615,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.2.1.1.b	132.295.000.000,00	47.169.725.887,00	35,65	48.099.866.347,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.2.1.1.c	63.900.000.000,00	63.549.348.856,97	99,45	62.318.561.125,83
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.2.1.1.d	147.380.805.237,47	138.338.770.510,18	93,86	121.870.883.539,91
7	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (3 s.d 6)		1.657.808.205.237,47	1.081.114.690.868,43	65,21	953.302.082.627,74
8	PENDAPATAN TRANSFER	5.2.1.2				
9	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	5.2.1.2.a				
10	Dana Bagi Hasil Pajak	5.2.1.2.a.1	131.088.982.000,00	97.619.861.575,00	74,47	122.359.289.780,00
11	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	5.2.1.2.a.2	161.076.476.000,00	121.160.438.963,00	75,22	116.882.059.110,00
12	Dana Alokasi Umum	5.2.1.2.a.3	1.347.785.960.000,00	1.347.785.960.000,00	100,00	1.269.426.417.000,00
13	Dana Alokasi Khusus	5.2.1.2.a.4	437.385.118.000,00	401.557.367.340,00	91,81	481.900.223.636,00
14	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (10 s.d 13)		2.077.336.536.000,00	1.968.123.627.878,00	94,74	1.990.567.989.526,00
15	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya					
16	Dana Insentif Daerah	5.2.1.2.b	61.655.874.000,00	61.655.874.000,00	100,00	25.250.000.000,00
17	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya (16)		61.655.874.000,00	61.655.874.000,00	100,00	25.250.000.000,00
18	Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	5.2.1.2.c				
19	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.2.1.2.c.1	559.706.021.967,09	613.860.738.833,11	109,68	346.457.350.708,14
20	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	5.2.1.2.c.2	93.346.300.000,00	91.449.906.840,00	97,97	13.896.140.873,00
21	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya (19 s.d 20)		653.052.321.967,09	705.310.645.673,11	108,00	360.353.491.581,14
22	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER (14+17+21)		2.792.044.731.967,09	2.735.090.147.551,11	97,96	2.376.171.481.107,14
23	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.2.1.3				
24	Pendapatan Hibah	5.2.1.3	306.822.478.000,00	171.342.103.169,00	55,84	156.409.070.615,00
25	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH		306.822.478.000,00	171.342.103.169,00	55,84	156.409.070.615,00
26	JUMLAH PENDAPATAN (7+22+25)		4.756.675.415.204,56	3.987.546.941.588,54	83,83	3.485.882.634.349,88
27						
28	BELANJA	5.2.2				
29	BELANJA OPERASI	5.2.2.1				
30	Belanja Pegawai	5.2.2.1.a	1.787.969.969.500,00	1.576.104.508.849,00	88,15	1.519.957.011.932,00
31	Belanja Barang dan Jasa	5.2.2.1.b	1.358.379.304.163,06	1.204.098.578.505,83	88,64	968.128.264.131,72
32	Belanja Subsidi	5.2.2.1.c	22.700.000.000,00	21.001.028.220,58	92,52	25.375.560.082,00
33	Belanja Hibah	5.2.2.1.d	49.693.505.000,00	44.336.296.614,00	89,22	116.358.106.939,00
34	Belanja Bantuan Sosial	5.2.2.1.e	3.975.000.000,00	2.975.000.000,00	74,84	5.777.750.000,00
35	JUMLAH BELANJA OPERASI (32 s.d 36)		3.222.717.778.663,06	2.848.515.412.189,41	88,39	2.635.606.813.084,72
36	BELANJA MODAL	5.2.2.2				
37	Belanja Tanah	5.2.2.2.a	39.988.900.000,00	9.161.308.600,00	22,91	21.364.009.193,00
38	Belanja Peralatan dan Mesin	5.2.2.2.b	224.765.498.629,19	171.360.546.371,07	76,24	115.580.816.582,73
39	Belanja Bangunan dan Gedung	5.2.2.2.c	200.554.782.702,40	145.956.211.832,11	72,78	139.071.244.239,17
40	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.2.2.2.d	996.502.324.769,00	698.327.521.362,66	70,79	505.396.602.776,94
41	Belanja Asel Tetap Lainnya	5.2.2.2.e	112.041.559.673,00	91.104.441.133,47	81,31	69.954.453.232,00
42	JUMLAH BELANJA MODAL (39 s.d 43)		1.563.853.065.773,59	1.115.910.029.299,31	71,36	851.367.126.023,84
43	BELANJA TAK TERDUGA	5.2.2.3				
44	Belanja Tak Terduga	5.2.2.3	1.832.000.000,00	581.821.993,00	31,76	80.609.703,00
45	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA (46)		1.832.000.000,00	581.821.993,00	31,76	80.609.703,00
46	JUMLAH BELANJA (35 + 42 + 45)		4.788.402.844.436,65	3.965.007.263.481,72	82,80	3.487.054.548.811,56
47	TRANSFER	5.2.2.4				
48	Belanja Bantuan Keuangan	---	3.200.000.000,00	3.199.457.726,65	99,98	1.189.877.819,80
49	JUMLAH TRANSFER (50 s.d 51)		3.200.000.000,00	3.199.457.726,65	99,98	1.189.877.819,80
50	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (48 + 52)	5.2.2	4.791.602.844.436,65	3.968.206.721.208,37	82,82	3.488.244.425.631,36
51						
52	SURPLUS / (DEFISIT) (28-37-44-48-52)		(34.927.429.232,09)	19.340.220.380,17	-55,37	(2.361.792.291,48)

No.	Uraian	Reff	2019			2018
			Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
53	PEMBIAYAAN	5.2.3				
54	PENERIMAAN DAERAH	5.2.3.1				
55	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	5.2.3.1	71.427.429.232,09	71.427.429.232,09	100,00	97.731.626.695,37
56	Penerimaan Piutang Daerah	---	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Jumlah Penerimaan Pembiayaan (56 s.d 57)		71.427.429.232,09	71.427.429.232,09	100,00	97.731.626.695,37
58	PENGELUARAN DAERAH	5.2.3.2				
59	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.2.3.2.a	36.500.000.000,00	35.444.000.000,00	97,11	19.500.000.000,00
60	Pembayaran Pokok Utang	5.2.3.2.b	0,00	0,00	0,00	4.442.405.181,80
61	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (61 s.d 61)		36.500.000.000,00	35.444.000.000,00	97,11	23.942.405.181,80
62	PEMBIAYAAN NETTO (61-65)		34.927.429.232,09	35.983.429.232,09	103,02	73.789.221.513,57
63						
64						
65	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA) (55+66)	5.2.4	0,00	55.323.649.612,26		71.427.429.232,09

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Palembang, 22 Juni 2020

Walikota Palembang



H. HARNOJOYO

3. NERACA

PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
NERACA
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

No	Uraian	Ref	2019	2018
1	ASET	5.1.1		
2	ASET LANCAR	5.1.1.1		
3	Kas di Kas Daerah	5.1.1.1.a	26.579.822.069,47	49.737.943.184,33
4	Kas di Bendahara Penerima	5.1.1.1.b	7.782.600,00	68.874.684,00
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.1.1.1.c	70.219.118,00	214.328.100,65
6	Kas di Bendahara BLUD	5.1.1.1.d	23.755.439.902,69	21.539.792.727,98
7	Kas Lainnya	5.1.1.1.e	0,00	116.489.334,00
8	Kas di Bendahara BOS	5.1.1.1.f	4.980.605.040,10	0,00
9	Piutang Pendapatan	5.1.1.1.g	394.800.918.751,05	563.241.724.273,16
10	Piutang Lainnya	5.1.1.1.h	1.145.797.089,39	23.240.403.253,51
11	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	5.1.1.1.i	(191.471.194.896,50)	(195.187.835.205,33)
12	Persediaan	5.1.1.1.j	48.675.816.341,90	56.277.555.660,08
13	Beban Dibayar Dimuka	5.1.1.1.k	216.453.368,17	208.893.404,94
14	Jumlah Aset Lancar (3 s.d. 13)		308.761.659.384,27	519.458.169.417,32
15				
16	INVESTASI JANGKA PANJANG	5.1.1.2		
17	Investasi Jangka Panjang Permanen	5.1.1.2.a		
18	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.1.1.2.a	1.370.634.791.748,21	1.247.771.828.698,54
19	Investasi Permenen Lainnya	5.1.1.2.a	0,00	0,00
20	Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen	5.1.1.2.a	1.370.634.791.748,21	1.247.771.828.698,54
21	Jumlah Investasi Jangka Panjang		1.370.634.791.748,21	1.247.771.828.698,54
22				
23	ASET TETAP	5.1.1.3		
24	Tanah	5.1.1.3.a	5.213.918.234.430,00	7.084.467.516.329,00
25	Peralatan dan Mesin	5.1.1.3.b	1.449.293.627.422,67	1.267.312.221.984,88
26	Gedung dan Bangunan	5.1.1.3.c	1.852.424.483.736,37	1.707.070.312.538,04
27	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.1.1.3.d	4.717.936.977.919,96	4.004.329.501.440,89
28	Aset Tetap Lainnya	5.1.1.3.f	318.830.656.854,91	247.059.665.795,51
29	Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.1.1.3.g	67.005.035.420,03	26.995.012.807,72
30	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	5.1.1.3.f	(2.095.733.859.552,14)	(1.840.938.544.737,62)
31	Jumlah Aset Tetap (24 s.d. 30)		11.523.675.156.231,80	12.496.295.686.158,42
32				
33	ASET LAINNYA	5.1.1.4		
34	Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	5.1.1.4.a	201.385.459,50	201.385.459,50
35	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.1.1.4.b	0,00	0,00
36	Aset Tak Berwujud	5.1.1.4.c	94.217.652.912,77	70.328.881.422,77
37	Aset Lain-lain	5.1.1.4.d	2.992.422.876.570,42	34.285.248.862,42
38	Akumulasi Penyusutan & Amortisasi Aset Lainnya	5.1.1.4.f	(11.542.649.757,97)	(7.956.498.993,00)
39	Jumlah Aset Lainnya (34 s.d. 38)		3.075.299.265.184,72	96.859.016.751,69
40	JUMLAH ASET		16.278.370.872.549,00	14.360.384.701.026,00
41				
42	KEWAJIBAN	5.1.2		
43	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.1.2.1		
44	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.1.2.1.a	70.219.118,00	215.618.314,22
45	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	5.1.2.1.b	0,00	64.933.488.506,66
46	Pendapatan Diterima Dimuka	5.1.2.1.c	12.320.053.648,28	9.949.124.104,76
47	Utang Beban	5.1.2.1.d	57.085.026.691,90	76.374.748.581,74
48	Utang Jangka Pendek Lainnya	5.1.2.1.e	239.142.879.722,12	181.340.179.674,39
49	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (44 s.d. 48)		308.618.179.180,30	332.813.159.181,77
50				
51	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	5.1.2.2		
52	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00
53	JUMLAH KEWAJIBAN (48+52)		308.618.179.180,30	332.813.159.181,77
54				
55	EKUITAS	5.1.3		
56	EKUITAS		15.969.752.693.368,70	14.027.571.541.844,20
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (53+56)		16.278.370.872.549,00	14.360.384.701.026,00

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Palembang, 22 Juni 2020
Walikota Palembang



H. HARNOJOYO